

# REPRESENTASI KEKUASAAN DALAM IMBAUAN DI RUANG PUBLIK

## *POWER REPRESENTATION IN PUBLIC SPACE APPEAL*

**Sri Wahyuni**

Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah  
Jalan Elang Raya No. 1, Mangunharjo, Tembalang, Semarang  
yuni.bbajateng@yahoo.com

### **Abstrak**

Imbauan di ruang publik merupakan suatu ajakan, imbauan, dan peringatan pada masyarakat untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pembuat imbauan (penguasa). Dengan demikian, bahasa merupakan unsur penting dalam penerapan kekuasaan. Penelitian ini mengkaji representasi kekuasaan pada imbauan di ruang publik dengan berdasarkan empat aspek kekuasaan, yaitu pandangan dominatif individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok yang lain, jarak sosial, praktik dominasi, dan praktik membangun kekuasaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya representasi kekuasaan pada imbauan di ruang publik.

**Kata kunci:** Imbauan, ruang publik, bahasa, representasi kekuasaan

### **Abstract**

*Appeal in public space is a request, direction, and warning to public to carry out what is required by the makers of the appeal (the ruling). Thus, language is an important element in the exercise of power. This study examines the power representation on the public space appeal based on four of power aspects, namely individual or group dominative perspective to other individual or group, social distance, the practice of domination, and the practice of building power. The method used in this study is a qualitative descriptive method. The research result showed that there was a tendency of power representation.*

**Keywords:** appeal, public space, language, power representation

## **1. Pendahuluan**

Thomas dan Waering (2007: 17) menyatakan bahwa bahasa adalah sebuah sistem atau lebih tepatnya, sekelompok sistem (sistem bunyi, sistem tata bahasa, dan sistem makna), dan variasi dalam penggunaan bahasa seringkali bersifat sistematis. Meskipun, bahasa bersifat sistematis, bahasa tetap dapat digunakan secara kreatif dan inovatif. Manusia juga dapat meng-

gunakan bahasa untuk menyatakan pendapat, pikiran, harapan, dan kemauannya kepada manusia lain sesuai dengan sifatnya.

Bahasa yang dituturkan seseorang terhadap orang lain dapat berbeda berdasarkan kekuasaan yang dimilikinya. Bahasa seorang ayah kepada anaknya berbeda dengan bahasa kepada istrinya. Bahasa seorang atasan kepada bawahannya tentu berbeda pula. Kekuasaan

dapat mengubah cara berbahasa seseorang terhadap orang lain. Berdasarkan hal tersebut, bahasa merupakan unsur penting dalam penerapan kekuasaan tidak dapat menjalankan dan merepresentasikan kekuasaannya tanpa bahasa. Demikian pula dengan pihak yang dikuasai, dia tidak dapat mengakui atau menerima suatu perintah atau mandat tanpa bahasa.

Representasi kekuasaan melalui bahasa antara lain terdapat pada imbauan yang digunakan di ruang publik. Imbauan di ruang publik dibuat oleh penguasa untuk mengajak atau meminta pihak yang dikuasai melakukan atau meninggalkan sesuatu, misalnya *Buanglah sampah pada tempatnya!* Kekuasaan pada imbauan Patau perintah dengan penanda kata *buanglah* yang bermakna 'perintah membuang'. Dalam imbauan tersebut, penguasa merepresentasikan kekuasaannya secara persuasif. Jika imbauan secara persuasif telah dipatuhi masyarakat, imbauan tersebut dianggap sudah cukup. Namun, jika masyarakat tidak melaksanakan imbauan tersebut, muncul imbauan lebih keras, misalnya *Dilarang buang sampah di sini! Kecuali monyet*. Hal ini diungkapkan dalam wacana kritis bahwa selalu ada unsur kekuasaan dalam setiap imbauan di ruang publik. Makna *imbauan* menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2008: 527) adalah "panggilan, seruan, dan ajakan". Namun, penguasa (pembuat imbauan) tetap mengharapkan suatu imbauan dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak yang dikuasai sesuai dengan yang dikehendaki oleh penguasa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa imbauan di ruang publik merupakan salah satu alat bagi penguasa dalam merepresentasikan kekuasaannya. Hal itu menjadi alasan bagi penulis untuk memilih penelitian representasi kekuasaan di ruang publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah bentuk tuturan apa saja pada ruang publik yang merepresentasikan kekuasaan. Dalam klasifikasi tersebut juga akan dibahas penanda-penandanya. Tujuan penelitian ini adalah mengkla-

sifikasikan bentuk tuturan apa saja pada ruang publik yang merepresentasikan kekuasaan beserta penanda-penandanya.

Penelitian tentang representasi kekuasaan berdasarkan analisis wacana kritis telah banyak dilakukan. Sebagian besar data penelitian terdahulu bersumber dari teks media. Dalam jurnal "Pertarungan Kekuasaan dalam Teks Media (Studi Analisis Wacana Kritis: Kasus Mesuji dalam Koran Jawa Pos)", Mujiyanto (2011) mengungkapkan permasalahan siapa saja yang terlibat dalam pertarungan kekuasaan, bagaimana bentuk dan strategi pertarungan kekuasaan yang ada dalam media.

Dadang, dkk. (2006) juga meneliti representasi kekuasaan pada sosok tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia dengan membandingkan wacana berita pada *Harian Umum Utusan Malaysia* dan *Harian Umum Kompas Indonesia*. Sosok TKW Indonesia diberitakan secara marginal melalui teknik inklusi pada *Harian Umum Utusan Malaysia*, sedangkan sosok majikan yang menganiaya TKW tersebut seolah dihilangkan.

Penelitian tentang imbauan di ruang publik telah dilakukan Wahyuni (2014, 2015). Namun, penelitian yang dilakukan Wahyuni (2014) hanya mengklasifikasikan imbauan di ruang publik berdasarkan jenis-jenis kalimat imperatif. Adapun, penelitian Wahyuni (2015) hanya membahas kekuasaan koersif pada larangan merokok beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kedua penelitian tersebut sama sekali tidak menganalisis secara detil representasi kekuasaan dalam imbauan di ruang publik berdasarkan empat aspek kekuasaan menurut Baryadi (2012).

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai pengguna bahasa supaya lebih kritis dan cermat dalam memahaminya dan menelaah tulisan-tulisan di ruang publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas sebagai bahan pertimbangan para pembuat kebijakan tentang penggunaan bahasa di ruang publik

sehingga pembuatan kebijakan dapat lebih cerdas dan berhati-hati dalam membuat tulisan di ruang publik.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori kekuasaan. Kekuasaan adalah sebuah konsep abstrak, tetapi sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Moore dan Hendry dalam Thomas (2007: 18) mendefinisikan kekuasaan sebagai kekuatan dalam masyarakat yang membuat tindakan terjadi. Oleh karena itu, dengan meneliti kekuasaan kita bisa mengenali siapa yang mengendalikan dan demi kepentingan siapa. Adapun Fairclough dalam Baryadi (2012: 19) menyatakan bahwa kekuasaan pada hakikatnya berkenaan dengan hubungan antarmanusia sebagai hubungan yang tidak seimbang (*unequal*) di antara dua pihak, yaitu salah satu pihak memiliki kekuasaan lebih besar daripada pihak yang lain.

Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dengan masyarakat. Setiap wacana yang muncul dalam bentuk teks, percakapan atau apa pun tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral, tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan (Eriyanto, 2001: 11). Menurut Fairclough dan Wodak dalam Eriyanto (2001: 7), analisis wacana kritis melihat wacana—pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan—sebagai bentuk dari praktik sosial. Analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai faktor penting, yakni bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat terjadi. Analisis wacana kritis menyelidiki bagaimana melalui bahasa kelompok sosial yang ada saling bertarung dan mengajukan versinya masing-masing.

Selanjutnya, Baryadi (2012: 21-22) merumuskan setidaknya ada empat aspek kekuasaan yang dapat diwujudkan ke dalam bahasa, yaitu (i) pandangan dominatif individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok yang lain, (ii) jarak sosial, (iii) praktik dominasi, dan (iv) praktik membangun kekuasaan. Pan-

dangan dominatif adalah anggapan bahwa kelompok yang satu lebih tinggi (ditinggikan), lebih utama (diutamakan), lebih penting (dipentingkan), atau lebih baik atau positif, sedangkan kelompok yang lain lebih rendah (direndahkan), lebih sekunder, lebih remeh, lebih buruk atau negatif. Pandangan dominatif ini mencakup (i) pandangan masyarakat yang menganggap suatu kelompok lebih dominan daripada kelompok yang lain dan (ii) pandangan penutur yang menganggap dirinya lebih dominan daripada mitra tutur. Jarak sosial antara penutur dan mitra tutur terkait dengan kedekatan (keintiman) hubungan antarmereka. Kedekatan mereka tergantung dari keakraban dan status sosialnya. Praktik dominasi berkenaan dengan bagaimana praktik kekuasaan dilakukan. Praktik dominasi dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu secara apresiatif, persuasif, dan koersif. Aspek praktik membangun kekuasaan merupakan praktik membangun kekuasaan individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok yang lain. Praktik membangun kekuasaan juga dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu secara apresiatif, persuasif, dan koersif. Praktik dominasi kekuasaan secara apresiatif adalah praktik kekuasaan yang diwujudkan oleh individu atau kelompok dengan cara menghargai, menghormati, serta mengasihi individu atau kelompok lain. Praktik dominasi kekuasaan secara persuasif adalah praktik dominasi kekuasaan yang diwujudkan oleh individu atau kelompok dengan cara memengaruhi individu atau kelompok lain. Praktik dominasi kekuasaan secara koersif adalah praktik dominasi kekuasaan yang diwujudkan oleh individu atau kelompok dengan cara memaksa individu atau kelompok lain untuk menuruti kehendaknya. Di samping itu, juga dapat dilakukan melalui gaya bahasa hiperbola, eufemisme, represif, dan orientasi dua nilai. Namun, tulisan ini hanya akan mendeskripsikan imbauan sebagai praktik membangun kekuasaan secara apresiatif, persuasif, dan koersif.

## 2. Metode

Metode penelitian ini deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan data secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya (Sutopo, 2002: 111).

Data dalam penelitian ini sebagian pernah digunakan dalam penelitian Wahyuni (2014). Data tersebut merupakan bahasa imbauan di ruang publik. Ruang publik dalam penelitian ini mencakup area yang dapat diakses atau dikunjungi oleh publik atau masyarakat umum. Data diperoleh melalui teknik dokumentasi dan teknik catat. Dokumentasi diperlukan karena sebagian besar data merupakan unsur-unsur kebahasaan di ruang publik berupa papan peringatan, spanduk, dan baliho. Setelah didokumentasikan, data dicatat. Selanjutnya, data dikelompokkan dan dianalisis dengan teknik analisis wacana kritis dan diklasifikasikan berdasarkan empat aspek kekuasaan yang disampaikan Baryadi. Teknik analisis data disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan permasalahan penelitian ini. (Badara, 2012: 72).

## 3. Hasil dan Pembahasan

Aspek-aspek kekuasaan yang memengaruhi penggunaan bahasa di ruang publik meliputi (i) pandangan dominatif individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok yang lain, (ii) jarak sosial, (iii) praktik dominasi, dan (iv) praktik membangun kekuasaan.

### 3.1. Pandangan Dominatif Individu atau Kelompok Terhadap Individu atau Kelompok yang Lain.

Pandangan dominatif individu terhadap individu, misalnya terdapat pada hubungan antara tuan dan pembantu, dokter dan pasien, dosen dan mahasiswa, guru dan murid, dan pemilik rumah dan pengguna jalan. Imbauan di ruang publik yang menunjukkan pandangan dominatif terdapat pada data berikut.

- (1) Dilarang memasang gambar/ poster dan mencorat-coret di sepanjang dinding/ pagar ini!
- (2) Dilarang parkir di depan pintu!
- (3) Dilarang berjualan di depan pagar!

Representasi kekuasaan pada data (1), (2), dan (3) terdapat pada kata *dilarang*. Bandingkan data tersebut dengan kalimat di bawah ini.

- (1a) *Tidak diperbolehkan/ Tidak diizinkan/ Tidak diperkenankan* memasang gambar/poster dan mencorat-coret di sepanjang dinding/ pagar ini
- (2a) *Tidak diperbolehkan/ Tidak diizinkan/Tidak diperkenankan* parkir di depan pintu
- (3a) *Tidak diperbolehkan/ Tidak diizinkan/Tidak diperkenankan* berjualan di depan pagar

Kata *dilarang* pada data (1), (2), dan (3) lebih merepresentasikan kekuasaan daripada frasa *tidak diperbolehkan, tidak diizinkan, dan tidak diperkenankan* yang terdapat pada kalimat (1a), (2a), dan (3a). Kata *dilarang* menunjukkan sikap tegas dalam imbauan tersebut.

Aspek pandangan dominatif data (1) terjadi antara pemilik rumah kepada orang yang selalu memasang gambar/poster dan mencorat-coret dinding atau pagar rumahnya. Data (2) juga merupakan representasi pandangan dominatif pemilik rumah kepada orang yang parkir di depan pintu rumahnya. Sementara itu, data (3) merupakan representasi pandangan dominatif pemilik rumah kepada orang yang berjualan di depan pagar rumahnya. Pandangan dominatif tersebut terjadi karena penguasa merupakan pemilik rumah, sedangkan pihak yang dikuasai adalah pihak luar yang berada di wilayah atau lingkungan kekuasaan pemilik rumah. Secara umum, pemilik rumah mendominasi kekuasaan di wilayah tersebut. Dalam pandangan dominatif, pemilik rumah memiliki kekuasaan memberi izin apakah pihak luar diperkenankan atau tidak melakukan sesuatu kegiatan di wilayah atau lingkungannya.

### 3.2. Jarak Sosial

Jarak sosial penutur dan mitra tutur semakin dekat apabila mereka sudah saling mengenal, bersahabat, dan status sosialnya sama. Akan tetapi, jarak sosial antara penutur dan mitra tutur akan semakin jauh apabila penutur berstatus sosial setara atau lebih tinggi daripada status sosial mitra tutur.

Imbauan di ruang publik yang merepresentasikan kekuasaan karena jarak sosial terdapat pada data berikut.

- (4) Pengamen-pemulung *dilarang* masuk
- (5) Selain mobil direktur *dilarang* parkir di sini
- (6) Bukan jalan umum, *khusus* untuk pegawai

Kekuasaan pada data (4) dan (5) juga direpresentasikan dengan kata *dilarang*. Bandingkan data (4) dan (5) dengan kalimat berikut.

- (4a) Pengamen-pemulung *tidak diperbolehkan/tidak diizinkan/tidak diperkenankan* masuk
- (5a) Selain direktur *tidak diperbolehkan/tidak diizinkan/tidak diperkenankan* parkir di sini.

Kalimat (4a) dan (5a) merupakan imbauan dengan tujuan dan makna sama, tetapi nilai rasa yang ditimbulkan berbeda. Penggunaan kata *dilarang* pada data (4) lebih merepresentasikan kekuasaan daripada frasa *tidak diperbolehkan, tidak diizinkan, dan tidak diperkenankan*.

Berdasarkan konteks, data (4) merupakan representasi kekuasaan karena jarak sosial. Data tersebut melibatkan pembuat imbauan (pengurus RT, RW, atau pihak kelurahan) sebagai pihak penguasa dan pengamen atau pemulung sebagai pihak yang dikuasai. Secara umum, pengurus RT atau RW serta penghuni rumah di wilayah tersebut dianggap memiliki status sosial lebih tinggi daripada pengamen atau pemulung. Perbedaan jarak sosial ini menyebabkan penguasa merepresentasikan kekuasaan melalui larangan memasuki wilayah pada pihak yang dikuasai. Seandainya pengamen dan pemulung memiliki jarak sosial yang

sama dengan penghuni atau penguasa wilayah tersebut, pengamen dan pemulung dipersilakan masuk ke wilayah tersebut.

Data 5 merupakan representasi kekuasaan berdasarkan jarak sosial juga. Jabatan direktur dianggap memiliki tingkat sosial lebih tinggi daripada jabatan lainnya. Hal itu direpresentasikan dengan mengutamakan mobil parkir direktur daripada mobil lainnya.

Kekuasaan pada data 6 ditandai dengan kata *khusus*. Penggunaan kata itu menunjukkan pengkhususan sesuatu untuk golongan tertentu saja. Hal itu menyingkirkan golongan lainnya. Pada data 6, status pegawai lebih diutamakan daripada masyarakat lain yang bukan pegawai. Oleh karena itu, pengkhususan jalan pegawai merupakan representasi kekuasaan karena jarak sosial.

### 3.3. Praktik Dominasi

Berdasarkan praktik dominasinya, kekuasaan dapat dibedakan menjadi kekuasaan apresiatif, kekuasaan persuasif, dan kekuasaan koersif.

#### 3.3.1. Kekuasaan Apresiatif

Imbauan di ruang publik yang menunjukkan praktik kekuasaan apresiatif terdapat pada data berikut.

(Tanda // pada data merupakan penanda akhir baris dalam setiap pernyataan di ruang publik.)

- (7) Penuhilah hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang serta terlindungi // Rembang menuju kabupaten layak anak
- (8) Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan
- (9) Berikan info kepada POLRI bila jumpai adanya tindak pidana // Hindari naik motor di jalan yang sepi/gelap // Upayakan tidak sendirian
- (10) Zebra Cross bukan sekedar garis// Beri Kesempatan kpd Penyeberang Jalan// Kurangi kecepatan// Berhenti di belakng garis

(11) Keamanan dan Keselamatan Anda Berlalu lintas di Jalan Harapan Kita bersama.

Kekuasaan pada data (7), (8), (9), dan (10) direpresentasikan melalui kalimat imperatif dengan penanda kata *penuhilah, jadilah, berikan, hindari, upayakan, beri, kurangi, dan berhenti*. Adapun, kekuasaan pada data (11) ditunjukkan melalui harapan (permintaan) penguasa supaya masyarakat (yang dikuasai) memprioritaskan keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas.

Data (7) merupakan praktik dominasi kekuasaan pemerintah kepada para orang tua anak (masyarakat). Imbauan ini merupakan praktik apresiasi perhatian, kasih sayang, dan kepedulian pemerintah kepada anak-anak. Data (8) dan (9) merupakan praktik kekuasaan pihak penguasa (POLRI) kepada pengguna jalan (masyarakat). Imbauan ini mengajak pengguna jalan untuk menjadi pelopor keselamatan dan membudayakan keselamatan. Data (9) merupakan praktik dominasi kekuasaan pihak penguasa (POLRI) kepada masyarakat untuk berpartisipasi melaporkan tindak kejahatan yang mereka ketahui. Imbauan tersebut menunjukkan perhatian dan peringatan penguasa terhadap keselamatan masyarakat. Data (10) juga merupakan praktik dominasi kekuasaan secara apresiatif. Penguasa (POLRI) merepresentasikan kekuasaannya dengan menyampaikan nasihat, peringatan, dan perhatian pada pihak yang dikuasai (pengguna jalan). Imbauan tersebut didahului informasi terlebih dahulu pada kalimat *Zebra Cross bukan sekedar garis*. Informasi itu menjadikan imbauan yang disampaikan tidak berkesan memerintah dan memaksa sehingga masyarakat pun merasa dihargai dan dihormati oleh penguasa. Jika kalimat informasi pada data (10) ditiadakan, imbauan yang sampai kepada masyarakat pun akan terasa berbeda. Bandingkan data (10) dengan kalimat berikut ini.

(11a) Beri Kesempatan kpd Penyeberang Jalan // Kurangi kecepatan // Berhenti di belakng garis

Terdapat perbedaan nilai rasa ketika kalimat informatif data (10) ditiadakan. Kekuasaan pada kalimat (10a) direpresentasikan lebih tegas dan persuasif. Data (11) juga merepresentasikan praktik dominasi kekuasaan penguasa kepada yang dikuasai. Data tersebut menunjukkan penghargaan penguasa kepada yang dikuasai (masyarakat). Bandingkan data (11) dengan kalimat berikut ini.

(11a) Jaga keamanan dan keselamatan Anda di Jalan

Penggunaan verba dasar *jaga* di di awal kalimat dan penghilangan kata *harapan* pada kalimat (11a) mengubah nilai rasa data (11). Jika dibandingkan dengan data (11), kalimat (11a) lebih menunjukkan ketegasan. Oleh karena itu, data (11) termasuk dalam praktik dominasi kekuasaan secara apresiatif.

### 3.3.2. Kekuasaan Persuasif

Kekuasaan persuasif menciptakan hegemoni terhadap kelompok yang didominasi untuk mematuhi kehendak kelompok yang dominan. Kepatuhan ini dilaksanakan bukan dikarenakan paksaan melainkan sudah merupakan hal yang sewajarnya.

Imbauan di ruang publik yang merepresentasikan kekuasaan persuasif terdapat pada data berikut.

(12) Awas hati-hati rawan kecelakaan

(13) Awas...!!! Sepeda motor Anda menjadi incaran pencuri // Jangan lupa kunci stang dan kunci rahasia

(14) Ayo Manfaatkan Pekarangan di sekitar kita

(15) Tamu harap lapor piket

Kekuasaan pada data (12), (13), (14), dan (15) direpresentasikan dengan penanda kata *awas hati-hati, awas, jangan lupa, ayo manfaatkan,*

dan *harap lapor*. Masyarakat yang menjadi penerima imbauan melakukan hal-hal tersebut dengan wajar bukan karena ancaman atau paksaan.

Data (12) merupakan praktik dominasi kekuasaan POLRI (penguasa) kepada masyarakat (pihak yang dikuasai). Dominasi kekuasaan tersebut dinyatakan dengan imbauan supaya masyarakat berhati-hati dalam berlalu lintas. Data (13) juga merupakan praktik dominasi kekuasaan secara persuasif dari penguasa kepada masyarakat supaya tidak lupa mengunci stang dan memasang kunci rahasia. Data (14) merupakan representasi dominasi kekuasaan penguasa kepada masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan. Imbauan tersebut juga ditujukan untuk sang penguasa sendiri. Hal itu terlihat pada kata ganti *kita* yang juga mengacu pada pembuat imbauan (penguasa). Data (15) merupakan praktik dominasi kekuasaan penguasa (pejabat atau pemilik gedung) kepada tamu untuk melapor pada petugas piket. Meskipun singkat, imbauan pada data (15) juga termasuk praktik dominasi kekuasaan secara persuasif. Bandingkan data tersebut dengan kalimat di bawah ini.

(15a) Tamu *wajib* lapor piket!

(15b) Tamu *harus* lapor piket!

(15c) Tamu lapor piket!

Meskipun berbeda, kalimat (15a), (15b), dan (15c) memiliki maksud dan tujuan sama dengan data (15). Penggunaan kata *wajib* dan *harus* dapat menggantikan fungsi kata *harap*, tetapi nilai rasa ketiga kalimat tersebut berbeda. Kalimat (15a), (15b), dan (15c) menunjukkan ketegasan, sedangkan data (15) lebih menunjukkan penghormatan dan penghargaan.

### 3.3.3. Kekuasaan Koersif

Praktik dominasi kekuasaan secara koersif adalah praktik dominasi kekuasaan yang diwujudkan oleh individu atau kelompok dengan cara memaksa individu atau kelompok lain

untuk menuruti kehendaknya. Kepatuhan itu didapat lewat tekanan, ancaman, peringatan, dan hukuman yang menimbulkan rasa takut.

Imbauan di ruang publik yang merupakan praktik dominasi kekuasaan secara koersif terdapat pada data berikut:

(16) Berjualan rokok ilegal dapat sanksi pidana.

(17) Merokok dapat Menyebabkan Kanker, Serangan Jantung, Impotensi dan Gangguan Kehamilan dan Janin

(18) Merokok Membunuhmu!

(19) Rokok Mengakibatkan Strok

Kekuasaan koersif pada data (16), (17), (18), dan (19) direpresentasikan dengan penanda ancaman dan peringatan berupa: sanksi pidana, penyebab kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin, bunuh diri, dan penyebab strok.

Data (16) merupakan praktik dominasi kekuasaan pemerintah kepada penjual dan perokok rokok ilegal. Sementara itu, data (17), (18), dan (19) merupakan praktik dominasi kekuasaan masyarakat bukan perokok (penguasa) kepada perokok (yang dikuasai). Imbauan data (16) merupakan peringatan dari penguasa kepada penjual dan perokok rokok ilegal untuk menghentikan peredaran rokok ilegal. Imbauan tersebut memiliki konteks ancaman. Bandingkan data (16) dengan kalimat di bawah ini.

(16a) Dilarang berjualan rokok ilegal

Terdapat perbedaan antara data (16) dan (16a) karena kalimat (16a) tidak disertai dengan ancaman. Data (17), (18), dan (19) merupakan imbauan berisi ancaman dan peringatan tentang rokok yang mengakibatkan berbagai macam penyakit, bahkan menjadi pembunuh perokok itu sendiri. Bandingkan pula imbauan dilarang merokok data (16), (17), (18), dan (19) dengan kalimat berikut.

(a) Silakan tidak merokok di ruangan ini

(b) Kami sangat berterima kasih bila Anda tidak merokok di ruangan ini

Meskipun kalimat (a) dan (b) memiliki tujuan sama dengan data (16), (17), (18), dan (19), kalimat (a) dan (b) tidak disertai ancaman dan tekanan.

### 3.4. Praktik Membangun Kekuasaan

Praktik membangun kekuasaan dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu secara apresiatif, persuasif, dan koersif.

#### 3.4.1. Praktik Membangun Kekuasaan secara Apresiatif

Praktik membangun kekuasaan secara apresiatif diwujudkan oleh individu atau kelompok dengan cara menghargai, menghormati, serta mengasihi individu atau kelompok lain. Imbauan yang termasuk dalam praktik membangun kekuasaan secara apresiatif terdapat pada data berikut.

(20) Melalui Konsolidasi Keluarga Besar FKPPi kita tingkatkan rasa solidaritas dan persaudaraan sesama anak bangsa

Data (20) merupakan praktik membangun kekuasaan secara apresiatif pengurus FKPPi kepada anggotanya. Praktik membangun kekuasaan data (20) direpresentasikan dengan satuan lingual *kita tingkatkan rasa solidaritas dan persaudaraan sesama anak bangsa*. Praktik tersebut dilakukan secara apresiatif dengan satuan lingual *melalui konsolidasi keluarga besar FKPPi*.

#### 3.4.2. Praktik Membangun Kekuasaan secara Persuasif

Praktik membangun kekuasaan secara persuasif dilakukan dengan cara memengaruhi individu atau kelompok lain. Imbauan yang termasuk dalam kategori tersebut terdapat pada data berikut.

(21) Mari Kita Sukseskan Program Pengembangan Ekonomi Lokal

(22) Mari Kita Wujudkan Partisipasi Aktif dalam Kegiatan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban

Data (21) dan (22) merupakan praktik dominasi kekuasaan secara persuasif dari pemerintah kepada masyarakat. Dominasi kekuasaan secara persuasif data (21) dan (22) direpresentasikan pada satuan lingual *Mari Kita Sukseskan* dan *Mari Kita Wujudkan*. Satuan lingual *Mari Kita Sukseskan* dan *Mari Kita Wujudkan* bertujuan untuk memengaruhi dan mengajak pembaca atau masyarakat untuk mematuhi kehendak pembuat imbauan. Data (21) dan (22) tidak memiliki makna yang mengandung ancaman. Masyarakat (pihak yang dikuasai) diharapkan untuk melaksanakan imbauan tersebut dengan sukarela. Oleh karena itu, kedua data tersebut merupakan praktik membangun kekuasaan secara persuasif.

#### 3.4.3. Praktik Membangun Kekuasaan secara Koersif

Praktik membangun kekuasaan secara koersif diwujudkan oleh individu atau kelompok dengan cara memaksa individu atau kelompok lain untuk menuruti kehendaknya. Cara ini dilakukan melalui tekanan, ancaman, peringatan, dan hukuman yang mengakibatkan pihak yang dikuasai melakukan apa yang dikehendaki pembuat imbauan. Hal tersebut terdapat pada data berikut.

(23) Tamu bermalam 1x24 jam, wajib lapor ketua RT // Gerbang ditutup pukul 22.00 WIB

(24) Stop Rokok Ilegal Karena Merugikan Negara

(25) Imbauan untuk SKPD Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

1. Penggunaan IP-Address yang telah ditentukan
2. Penambahan/pemasangan titik internet agar berkoordinasi dengan Bagian Telematika.
3. Tidak merubah settingan proxy dan port yang telah ditentukan.
4. Penggunaan internet untuk hal yang bermanfaat karena bila dipergunakan tidak semestinya akan mengganggu kestabilan jaringan SKPD lain.



Berdasarkan konteks, data (23), (24), dan (25) termasuk dalam praktik membangun kekuasaan secara koersif. Kekuasaan secara koersif ditunjukkan dengan penanda peringatan berupa: gerbang ditutup; merugikan negara; mengganggu kestabilan jaringan SKPD lain.

Data (23) merupakan representasi kekuasaan antara pengurus RT dan tamu bermalam (warga). Aspek praktik membangun kekuasaan pada data (23) direpresentasikan satuan lingual *wajib lapor ketua RT*. Kekuasaan tersebut ditunjukkan secara koersif melalui peringatan *gerbang ditutup pukul 22.00 WIB*. Selain sebagai informasi, kalimat tersebut juga memiliki makna peringatan bahwa gerbang akan ditutup pukul 22.00 WIB. Oleh sebab itu, tamu bermalam harus lapor ketua RT. Data (24) merupakan praktik membangun kekuasaan antara pemerintah sebagai pihak penguasa kepada penjual rokok ilegal sebagai pihak yang dikuasai. Kekuasaan tersebut direpresentasikan secara koersif dengan peringatan dapat *merugikan negara*. Data (25) memiliki 4 imbauan sebagai praktik membangun kekuasaan pihak pengelola internet. Imbauan tersebut terdapat pada poin 1, 2, 3, dan 4. Kekuasaan secara koersif ditunjukkan melalui peringatan *mengganggu kestabilan jaringan SKPD lain*.

Hubungan kekuasaan antara pengurus RT dan tamu bermalam, pemerintah dan penjual rokok ilegal, pemerintah kota dan staf, pengurus wilayah dan warga luar.

#### 4. Simpulan

Imbauan di ruang publik merupakan bentuk representasi kekuasaan. Kekuasaan itu direpresentasikan dengan tujuan supaya imbauan tersebut dipatuhi pihak yang dikuasai. Ketika imbauan tersebut dipatuhi, tujuan pembuat imbauan tercapai. Representasi kekuasaan pada imbauan di ruang publik dilakukan dalam bentuk larangan, perintah, anjuran, sindiran, harapan, peringatan, dan ancaman. Adapun, aspek yang memengaruhi kekuasaan

bergantung pada siapa penguasa atau pembuat imbauan dan siapa yang dikuasainya.

Dalam setiap imbauan di ruang publik selalu ada pihak yang menguasai dan dikuasai. Oleh karena itu, prinsip menghargai dan menghormati kedua belah pihak harus tetap ditegakkan dalam pembuatan imbauan di ruang publik. Pihak yang menguasai dapat lebih santun dan hormat dalam membuat imbauan, sedangkan masyarakat atau pihak yang dikuasai dapat lebih menghargai imbauan dengan mematuhi.

#### 5. Daftar Pustaka

- Badara, Aris. 2012. *Analisis Wacana; Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Baryadi, I. Praptomo. 2012. *Bahasa, Kekuasaan, dan Kekerasan*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Mujiyanto. 2011. "Pertarungan Kekuasaan dalam Teks Media (Studi Analisis Wacana Kritis: Studi Kasus Mesuji dalam Koran *Jawa Pos*)". Dalam *Jurnal Politeknik Negeri Malang*. Vol. 1/2. November 2011. Dalam <http://jlt-polinema.org/?p=132> (diakses pada 3 Februari 2016).
- Suganda, Dadang, dkk. 2006. "Representasi Sosok Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia dalam Wacana Berita pada Harian Umum *Utusan Malaysia* dan Harian Umum *Kompas Indonesia* (Kajian Analisis Wacana Kritis)". Makalah Simposium Kebudayaan Indonesia Malaysia X kerja sama Universitas Padjajaran dan Universitas Kebangsaan Malaysia pada 29–31 Mei 2007. Fakultas Sastra. Universitas Padjajaran Bandung.

- Sutopo, H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Thomas, Linda & Wareing, Shan. 2007. *Bahasa, Masyarakat & Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahyuni, Sri. 2014. "Imperatif dalam Imbauan di Ruang Publik". Dalam Jurnal Jalabahasa. Vol. 10, Nomor 1, Mei 2014.
- Wahyuni, Sri. 2015. "Peringatan Bahaya Merokok dan Representasi Kekuasaan". Dalam Jurnal Widyariset LIPI. Vol. 18, Nomor 2, Agustus 2015. Dalam <http://widyariset.pusbindiklat.lipi.go.id/index.php/widyariset/article/view/306> diakses 24 Mei 2016.